

Jurnal Ilmiah Administrasi Negara

Sistematika buku "Pengantar Ilmu Komunikasi" ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 14 Bab yang dibahas secara rinci dalam pembahasan, diantaranya: Mengenal Komunikasi; Sejarah Komunikasi Manusia Dan Sejarah Perkembangan Ilmu Komunikasi; Tujuan Dan Akibat Komunikasi; Prinsip Dasar Dan Tingkatan Proses Komunikasi; Pengertian Dan Model Dasar Komunikasi; Fungsi Dan Pengaruh Model Komunikasi; Batasan, Fungsi Dan Jenis Komunikasi Nonverbal; Definisi, Tujuan Dan Efektivitas Komunikasi Pribadi; Pengertian, Karakteristik Dan Fungsi Komunikasi Massa; Proses Dan Dampak Komunikasi Massa; Peran Kebudayaan Dalam Kehidupan Manusia, Serta Pengaruh Kebudayaan Terhadap Komunikasi; Komunikasi Antar Budaya Serta Pemakaiannya; Karakteristik Saluran Komunikasi Dan Khalayak Dalam Komunikasi Yang Efektif; serta Karakteristik, Bentuk Dan Teknik Penyajian Pesan Dalam Komunikasi Yang Efektif. - MENGENAL KOMUNIKASI - SEJARAH KOMUNIKASI MANUSIA DAN SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU KOMUNIKASI - TUJUAN DAN AKIBAT KOMUNIKASI - PRINSIP DASAR DAN TINGKATAN PROSES KOMUNIKASI - PENGERTIAN DAN MODEL DASAR KOMUNIKASI - FUNGSI DAN PENGARUH MODEL KOMUNIKASI - BATASAN, FUNGSI DAN JENIS KOMUNIKASI NONVERBAL - DEFINISI, TUJUAN DAN EFEKTIVITAS KOMUNIKASI PRIBADI - PENGERTIAN, KARAKTERISTIK DAN FUNGSI KOMUNIKASI MASSA - PROSES DAN DAMPAK KOMUNIKASI MASSA - PERAN KEBUDAYAAN DALAM KEHIDUPAN MANUSIA, SERTA PENGARUH KEBUDAYAAN TERHADAP KOMUNIKASI - KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA SERTA PEMAKAIANNYA - KARAKTERISTIK, BENTUK DAN TEKNIK PENYAJIAN PESAN DALAM KOMUNIKASI YANG EFEKTIF - KARATERISTIK SALURAN KOMUNIKASI DAN KHALAYAK DALAM KOMUNIKASI YANG EFEKTIF

Program penerimaan zakat tidak dapat diarahkan selain kepada peningkatan taraf hidup fakir miskin Q.S.At-Taubah ayat (60). Zakat merupakan poros dan pusat keuangan negara yang meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, penegakan hukum zakat mengikis habis sifat kerakusan, keserakahan, sifat kikir dan bakhil si kaya. Dalam bidang sosial, hukum zakat mengajak orang memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang beruntung dan berperan sebagai alat untuk menciptakan persamaan antara kaya dan miskin. Sedang dalam bidang ekonomi, hukum zakat mencegah sifat kapitalisme atau penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Buku Hukum Zakat : Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat ini menunjukkan bahwa implementasi undang-undang pengelolaan zakat (UUPZ) tidak mengganggu kebebasan kehidupan bergaama di Indonesia. Hal yang menyangkut pengantasan kemiskinan dan perwujudan kemakmuran rakyat belum dicapai secara optimal. Indikator potensi zakat Indonesia terbesar di seluruh dunia, tetapi yang dapat dikumpulkan sangat minim. Dampaknya, distribusi zakat masih dominan berorientasi konsumtif yang tidak dapat mengangkat taraf hidup orang-orang miskin. Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai hasil riset dengan tiga isu akuntansi publik yaitu isu akuntansi pemerintah daerah, isu organisasi publik (nirlaba), dan isu akuntansi bumdes. Dari ketiga isu tersebut menjadi 22 sub judul yang menarik untuk dibaca. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah literatur bagi yang berminat mendalami dan meneliti ilmu akuntansi (sektor) publik. Sebuah peristiwa penting yang menjadi milestone perkembangan Akuntansi Publik terjadi di FEB UGM pada tanggal, 1 Desember 2018 yaitu perubahan nama dari Akuntansi Sektor Publik (ASP) menjadi Akuntansi Publik (AP) pada acara Workshop Akuntansi Publik "Posisi dan Teori Dasarnya" yang dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai PTN/PTS se Indonesia. Penyebutan kata "sektor" menempatkan akuntansi untuk organisasi nirlaba ini sebagai subordinat atau cabang dari akuntansi yang lebih besar,

dalam hal ini adalah akuntansi untuk organisasi bisnis. Oleh karena itu penggunaan kata yang tepat adalah Akuntansi Publik (tanpa sector). Akuntansi Publik adalah akuntansi yang memiliki hulu sendiri yang terpisah dari hulu Akuntansi Bisnis. Beberapa argument yang mendukung diantaranya: adanya perbedaan latar belakang pembentukan organisasi, tujuan pendirian organisasi dan cara pencapaian tujuan organisasi, serta sumber dan sifat pendanaan organisasi. Perbedaan-perbedaan ini memberikan konsekuensi perbedaan yang signifikan di antara kedua dunia akuntansi tersebut pada aspek perencanaan dan penganggaran, sistem pelaporan keuangan (akuntansi keuangan), maupun akuntansi manajemen.

Sistematika buku "Reformasi Administrasi Publik" ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 8 Bab, diantaranya: Memahami Administrasi dan Administrasi Publik yang membahas tentang Pengertian Administrasi baik arti Sempit dan Luas, Pengertian Administrasi Publik dan Pembagian Administrasi Publik; Konsep Dasar Reformasi dan Reformasi Administrasi Publik membahas tentang Pengertian Reformasi, Pengertian Reformasi Administrasi Publik, Strategi Reformasi Administrasi Publik; Sejarah Perkembangan Paradigma Administrasi Publik membahas tentang Paradigma Old Public Administration, Paradigma New Public Management, Paradigma New Public Services dan Perbandingan OPA, NPM, dan NPS; Patologi Administrasi Publik membahas tentang Pengertian Patologi dan Patologi Administrasi Publik, Bentuk-Bentuk Patologi Administrasi Publik, dan Terapi Patologi Administrasi Publik; Lingkup Reformasi Administrasi Publik membahas tentang Tuntutan Reformasi Administrasi Publik, dan Tujuan Reformasi Administrasi Publik; Reformasi Aparatur Negara membahas tentang Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Reformasi Aparatur Negara ; Reformasi Pelayanan Publik membahas tentang Definisi Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, dan Reformasi Pelayanan Publik; dan Reformasi Birokrasi Pemerintah yang membahas tentang Pengertian Birokrasi, serta Reformasi Birokrasi Pemerintah.

The 1st International Conference On Culture, Education, Linguistics, and Literature (CELL) Universitas Jenderal Soedirman (Jenderal Soedirman University). The rapid development of information and communication technology on information continuously encourages the global society known as Industrial Revolution 4.0. It was first introduced by German Economist, Klaus Schwab, in his book entitled "The Fourth Industrial Technology" in 2012. The complexity and interconnected sector in our daily life urge all stakeholders of the global society (governments, business actors, academicians, and civil society) have the responsibility to work together. The conference invites delegates from across Indonesian and attended by more than 75 participants from university academics, researchers, practitioners, and professionals across a wide range of industries.

Substantive Justice International Journal of Law is published on behalf of the Faculty of Law in the Universitas Muslim Indonesia. It is a forum for outstanding original contributions to legal studies, with an emphasis on matters of theory and on broad issues arising from the relationship of law to other disciplines. In addition to traditional questions of legal interest, the following are all within the purview of the journal: comparative and international law, the law of the Republic of Indonesia, legal history and philosophy, and interdisciplinary material that is relevant to legal studies.

This book provides holistic insights into management of protected areas across East Asia and identifies current trends in mountain tourism within the broader field of human geography and nature conservation. The book describes the diversification in visitors and expanding protected areas territories in different Asian countries during recent years. It also compares protected areas networks in the context of the changing demographic profiles of visitors and provides an interdisciplinary transnational appraisal of mountain-based tourism in Asia based on national and international statistics. The research combines specific case studies at the individual country and destination level with trans-regional trends, thereby offering analysis from both the

perspective of supply (parks, protected areas, and stakeholders) and demand (mountain tourist market trends and segments). The book is a useful resource for students and academics in tourism and protected areas studies as well as social scientists and policy-makers interested in Asian countries.

Cita-cita negara hukum Indonesia merupakan cita-cita yang terus hidup dalam hati masyarakat Indonesia. Sebagai gagasan ia disambut dengan antusias dan dibahas dalam sidang-sidang rapat Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Konstitusi dan praktik ketatanegaraan pada awal kemerdekaan sampai tahun 1957 mencerminkan dianutnya konsep negara hukum yang demokratis. Namun, sesudah itu ia tenggelam dalam arus ideologi patrimonialisme Demokrasi Terpimpin. Rezim demokrasi Terpimpin yang otoritarian itu berusaha mengubur habis gagasan dan konsep negara hukum, dengan memberikan tafsir otoritarianistik UUD 1945 sebagai dasar untuk mengabsahkan praktik ketatanegaraan yang sesungguhnya menyimpangi konstitusi tersebut. Namun, cita negara hukum yang demokratis itu tetap hidup dalam hati dan pikiran para penentang demokrasi Terpimpin. Maka ketika rezim demokrasi Terpimpin ambruk seketika itu pula para mahasiswa, intelektual, golongan profesi, dan masyarakat politik Indonesia menggemakan kembali gagasan dan konsep negara hukum.

Dasar-dasar Manajemen adalah judul buku yang tersusun atas berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan bidang ilmu manajemen yang diuraikan dalam dua belas bab yaitu konsep dasar manajemen, perkembangan ilmu manajemen, lingkungan organisasi, fungsi perencanaan dan penetapan tujuan organisasi, fungsi pengorganisasian dan manajemen sumber daya manusia, motivasi dan kepemimpinan, komunikasi manajerial di era digital, perilaku individu dalam organisasi, mengelola konflik di lingkungan kerja, pengambilan keputusan, fase manajemen perubahan, serta fungsi pengawasan dalam organisasi.

We are glad to introduce you the proceedings of the first International Conference on Economics, Business and Social Humanities (ICONEBS 2020). The 1st ICONEBS 2020 addresses challenges and innovations in the field of economics, business, and social humanities. The conference is enriched with renowned keynote speakers who discuss in the central theme of "The Dynamics of Economics, Business, and Social Humanities". The ICONEBS conference is hosted by State Polytechnic of Madiun and co-hosted by Aviation Polytechnic of Surabaya and Polytechnic of Jambi. This year, we held this flexible online conference to gather experts and scholars around the globe with the aim to continue disseminating the latest advanced research in the field of the dynamics of economics, business, and social humanities. We are glad to share with you that around 102 pre-registered authors are submitted their work in the conferences. However, its about 60 papers are selected and accepted for the conferences. All the papers have been through rigorous review by a panel of reviewers who provide critical comments and corrections, and have contributed substantially to the improvement of the quality of the papers to meet the requirements of International publication standard. We would like to express our sincere gratitude to the Chairman, the distinguished keynote speakers, as well as all the participants. We also want to thank the publisher for publishing the proceedings. May the readers could enjoy the gain some valuable knowledge from it. We are expecting more and more experts and scholars from all over the world to join this international event next year.

The theme of the conference is "Reconstructing Morals, Education, and Social Sciences for Achieving Sustainable Development Goals". This theme was formulated due to several considerations. First, the symptoms of moral decline that have the potential to destroy the nation. Morals guide humanity towards truth and civilization. The phenomenon of the dehumanization process in the industrial era that pushed people to be part of abstract societies tends to ignore humanity. The education process as a humanitarian system is increasingly marginalized, especially during discussions about the industrial revolution 4.0 and Society 5.0. The conference placed six sub-themes for speakers and participants to share ideas, namely:

Social Sciences and Laws, History and Cultural Studies, Interdisciplinary Studies, Morals and Humanities, Policy, Politics, and Communication, Education. The committee has received 195 abstracts from prospective speakers. However, there are only 80 abstracts that are eligible to be presented at this conference.

Sistematika buku Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 9 bab yang dibahas secara rinci, diantaranya: E-Commerce, E-Government, E-Learning, E-Library, E-Banking, E-Procurement, E-Health, Open Journal System (Ojs), dan Financial Technology (Fintech). Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Pemanfaatan Teknologi Digital.

Keberadaan arsip mencerminkan suatu endapan informasi pelaksanaan kegiatan administrasi atau transaksi yang memerlukan pengaturan. Oleh karena itu, pengelola arsip juga harus memahami manajemen sekaligus kebijakan tentang kearsipan. Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak seperti pemerintah, arsiparis, tenaga pengelola kearsipan, masyarakat umum serta mahasiswa dan akademisi di ranah ilmu kearsipan atau ilmu yang serumpun.

Salah satu determinan utama dalam kehidupan organisasi, termasuk di sektor publik, adalah kepemimpinan. Kepemimpinan mempunyai peran sentral dalam kehidupan organisasi. Tanpa adanya kepemimpinan yang baik, akan sangat sulit bagi organisasi publik untuk mencapai tujuannya, yaitu memenuhi tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsinya yang strategis dalam pelayanan publik. Bahkan begitu pentingnya masalah kepemimpinan ini, menjadikan pemimpin selalu sebagai fokus atensi tentang penyebab keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Buku ini menyajikan isu dan berbagai konsep – teori yang relatif baru dalam ranah kepemimpinan, seperti Kepemimpinan Transformasional, Servant Leadership & Kepemimpinan Otentik.

Political system in the reform era of Indonesia.

Buku ini menjelaskan tentang karakteristik pelayanan publik yaitu prinsip dan komponen pelayanan, asas-asas pelayanan publik, strategi peningkatan pelayanan publik, usaha untuk meningkatkan semangat, tugas, fungsi, dan struktur organisasi pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, SOP Alur pelayanan administratif pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Praktik pelayanan publik tidak terlepas dari praktik administrasi publik yang diaplikasi di banyak negara. Pelayanan publik merupakan salah satu isu atau tujuan penting dari administrasi publik yang meliputi penyelenggaraan public services, public affairs (public interests and public needs), and distribution of public service equally. Konsepsi pelayanan publik berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan, dan dalam hal ini setidaknya ada 3 perspektif administrasi publik yang bisa kita gunakan untuk mengkaji pelayanan publik yakni perspektif Old Public Administration, New Public Management, and New Public Service. Sesungguhnya pelayanan publik sebagai bagian dari upaya-upaya mewujudkan good governance, dapat dilihat melalui tiga langkah strategis: Pertama, interaksi antara Negara (yang diwakili pemerintah) dengan warganya, termasuk berbagai kelompok atau lembaga di luar pemerintah dalam pelayanan publik. Kedua, pelayanan publik merupakan ranah dimana prinsip-prinsip good governance dapat diartikulasikan dengan lebih baik. Ketiga, pelayanan publik melibatkan semua kepentingan yang berada di dalam negara. Pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu konsep Birokrasi di kebanyakan negara berkembang cenderung bersifat patrimonialistik: tidak efisien, tidak efektif (over

consuming and under producing), tidak obyektif, anti terhadap kontrol karena orientasi dan kritik, tidak mengabdikan kepada kepentingan umum lebih pada melayani pemerintah, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen politis dengan sifat sangat otoritatif dan represif, ciri dari birokrasi negara berkembang yaitu: Pertama, administrasi publiknya bersifat elitis, otoriter, menjauh atau jauh dari masyarakat dan lingkungannya serta paternalistik. Kedua, birokrasinya kekurangan sumber daya manusia (dalam hal kualitas) untuk menyelenggarakan pembangunan dan over dalam segi kuantitas. Ketiga, birokrasi di negara berkembang lebih berorientasi kepada kemanfaatan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat. Keempat, ditandai adanya formalisme. Yakni, gejala yang lebih berpegang kepada wujud-wujud dan ekspresi-ekspresi formal dibanding yang sesungguhnya terjadi. Kelima, birokrasi di negara berkembang acapkali bersifat otonom. Artinya lepas dari proses politik dan pengawasan publik. Administrasi publik di negara berkembang umumnya belum terbiasa bekerja dalam lingkungan publik yang demokratis. Dari sifat inilah, lahir nepotisme, penyalahgunaan wewenang, korupsi dan berbagai penyakit birokrasi yang menyebabkan aparat birokrasi di negara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang perlu dibenahi melalui suatu reformasi secara mikro maupun makro.

Buku yang berjudul "Pemerintahan Desa dan Kualitas Pelayanan Publik" sebagai bagian dari penelitian yang dilaksanakan tahun 2016. Buku ini terselesaikan tentu tidak hanya karena penulis telah berusaha maksimal akan tetapi karena bantuan serta dukungan dari beberapa pihak. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kajian ilmu administrasi publik dan lainnya sehingga dapat menjadi bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Di dalam buku ini mengkaji tentang pemerintahan desa dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Penulisan buku ini sebagai sumbangan bagi pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Secara keseluruhan, materi buku ini merupakan suntingan disertasi penulis yang berjudul "Pembangunan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam menyelenggarakan Urusan Kesehatan Di Kota Malang?". Selama ini memang sudah banyak buku yang bertajuk capacity building, namun menurut hemat penulis belum menyertakan hasil kajian empiris secara komprehensif. Di samping memberikan pemetaan teoritis berbagai dimensi capacity building atau pembangunan kapasitas, materi dalam buku juga memaparkan pengalaman empiris pembangunan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan kesehatan di Kota Malang, yang dilengkapi dengan suatu analisis untuk menghasilkan suatu model pembangunan kapasitas pemerintah daerah?. Bagian pertama buku ini, memuat arti penting capacity building bagi organisasi sektor publik dan berbagai persoalan empiris dan teoritis dari capacity building yang menjadi pijakan penulis untuk mengkaji persoalan ini lebih mendalam. Bagian kedua, menjelajahi berbagai khasanah teoritis dari capacity building, yang meliputi dimensi-dimensinya, yakni, dimensi pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan. Di samping itu juga dibahas mengenai berbagai aspek dari kinerja pemerintahan dan indikator pengukuran kinerja. Bagian ketiga, memaparkan secara komprehensif pengalaman empiris pembangunan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan kesehatan di Kota

Malang. Sedang pada bagian keempat atau bagian terakhir dari buku ini, memuat hasil analisis dan pengembangan model pembangunan kapasitas pemerintah daerah. Sebuah perkembangan baru di bidang teknologi informasi pada abad ini, telah memberikan kemudahan manusia untuk berkomunikasi. Namun demikian hal ini berdampak terhadap aktivitas di seputar kehidupan masyarakat. Artinya di dalam berbagai sektor telah terimbas dengan masalah teknologi komunikasi tersebut. Akibat yang ditimbulkan adalah banyak sektor yang mengalami perubahan. Teknologi informasi dalam hal ini tentu saja memberikan dampak terhadap sektor pelayanan jasa kepada pihak publik. Bagaimanapun pelayanan publik tersebut menjadi bagian strategis dari sebuah layanan yang dilakukan oleh pemerintah. Lebih lanjut perkembangan teknologi informasi maupun telekomunikasi kemudian berhasil mendorong berlangsungnya inovasi pelayanan publik. Adapun pelayanan publik yang diselenggarakan dewasa ini telah banyak dilakukan perubahan dan peningkatan kualitas dan kuantitas. Model pelayanan yang ada melalui e-Government sebagai bentuk layanan modern. Sementara itu bentuk layanan pemerintah pada mulanya bersifat birokratis serta masih terkesan kaku. Bertolak dari permasalahan yang dihadapi maka perlu diminimalisasi melalui penggunaan sistem pelayanan e-Government. Hal ini telah berhasil menjadikan layanan kependudukan menjadi lebih fleksibel dan lebih berorientasi kepada kepentingan pengguna. Untuk itulah maka kepuasan pelayanan masyarakat pengguna menjadi lebih efektif

Administrasi merupakan fungsi yang memegang peranan sangat penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan, maupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan/organisasi. Sehingga dapat dikatakan administrasi merupakan urat nadi perusahaan dan administrasi juga dapat memperlihatkan fakta dan keterangan yang diperlukan untuk perencanaan secara rinci dan keterangan/data yang meliputi catatan yang akurat, formulir serta laporan yang meliputi tugas administrasi. Dalam buku ini dibahas hal-hal yang merupakan pengantar ilmu administrasi, di antaranya adalah pengertian administrasi dan ilmu administrasi, perkembangan administrasi, unsur-unsur administrasi, sejarah asal-usul administrasi, dan pembangunan administrasi.

Diharapkan buku ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat umum.

Previous research on corporate cultures and ethical business cultures has focused almost exclusively on studies of multinational corporations from a handful of developed countries. This book addresses the intersection of human resource development and human resource management with ethical business cultures in the four BRIC countries, and four other fast-growing emerging economies: those of Mexico, Indonesia, South Africa and Turkey. Drawing on longitudinal large-scale survey-based studies, it compares managers' and employees' perceptions of ethical business cultures in these countries, contrasting them with the US economy. It then discusses the economic and socio-cultural context and current research on business ethics in each of these countries, including implications for research and practice. This significant study will appeal to scholars, researchers and students in business ethics, management, human resource management and development, and organization studies, and addresses issues faced daily by business executives and practitioners working in emerging market countries.

Banyaknya Permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini yang multidimensional dan sangat kompleks, salah satunya adalah pelayanan publik. hal ini dapat kita rasakan

secara langsung dilapangan ketika bersentuhan dengan birokrasi pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. pembahasan yang penulis sampaikan dalam buku ini adalah mengenai reformasi birokrasi dengan mengupayakan perbaikan melalui inovasi pelayanan publik. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di setiap daerah di Indonesia. Desentralisasi ini memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan desa merupakan salah satu yang menjadi unsur dari kelembagaan pemerintah Indonesia. Desa juga merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Terkait dengan pemahaman desa, inilah yang menjadi suatu tatanan bahwa Pemerintah Daerah berhak dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, dalam tatanannya Pemerintah Desa pun seharusnya perlu dikembangkan pula agar dapat menjadi desa mandiri, karena desa merupakan salah satu pondasi kuat dalam pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Buku Hukum Administrasi Negara yang kita sajikan memiliki kelebihan dibandingkan dengan buku hukum administrasi negara yang ada sekarang karena membahas tentang hukum administrasi negara menurut UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan serta membandingkan dengan undang-undang yang terdahulu. Kelebihan lain di dalam UU No 30 Tahun 2014 tersebut adalah penggunaan simbol "Citizen Friendly" dalam suatu produk aturan perundangan tersebut yang merupakan prototype baru dalam sejarah perjalanan peraturan perundangan dalam kehidupan berbangsa khususnya Dalam Simbolisasi Administrasi Pemerintahan di Indonesia. Dengan simbol itu suatu tata nilai baru akan dijunjung tinggi dan akan dijadikan dasar evaluasi dalam perjalanannya. Menarik untuk dicermati dan ditelusuri kenapa simbolisasi tersebut sampai tercantum dalam produk hukum dan baru kali ini tercantum dalam aturan perundangan di Indonesia. Rumusan tersebut tercantum secara eksplisit pada bagian penjelasan umum undang-undang nomor 30 tahun 2014. Legislator Undang-undang ini terkesan ingin membangun image baru dan pesan baru yang sengaja dikobarkan lewat simbol itu. Yakni kesan dan pesan baru tentang administrasi pemerintahan yang "ramah" serta sifat kesamaan kedudukan antara "penguasa" dengan "yang dikuasai". Citizen Friendly dalam bidang administrasi, biasa dikaitkan dengan reformasi birokrasi, yang dikaitkan dengan bagaimana membangun administrasi pemerintahan yang ramah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pesan yang lain terdapat keinginan berubah

secara mendasar tentang administrasi pemerintahan di Indonesia, yang semula cenderung lebih menonjolkan faktor otoritas formal dari sebuah kekuasaan, berubah menuju administrasi pemerintahan yang ramah, dengan mendasarkan pada kemampuan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, dengan mendasarkan pada azas bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Diharapkan buku ini dapat menjadi bahan acuan bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mengenal dan mengetahui tentang perkembangan terbaru hukum administrasi negara menurut UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Buku Ilmu Administrasi Publik Kontemporer ini menyajikan: 1. Sejarah perkembangan ilmu administrasi negara di Indonesia dan prospeknya di masa mendatang. 2. Administrasi publik: old public administration, new administration, reinventing bureaucracy. 3. Citizenship democratic. 4. Hubungan administrasi publik dan kebijaksanaan publik. 5. Human governance. 6. Perilaku dan pembinaan organisasi. 7. Demokrasi dan tipe-tipe kekuasaan dalam pemerintahan. --- Buku persembahkan penerbit Prenadamedia Kencana Perilaku Organisasi berkaitan dengan studi tentang persepsi, nilai, sikap dan perilaku pada level individu dan kelompok yang dapat memengaruhi keberlangsungan organisasi. Untuk itu, perlu adanya strategi yang memberdayakan demi perubahan perilaku, pengembangan motivasi dan transformasi budaya, serta berbagai strategi pengembangan organisasi lainnya yang relevan dan tepat untuk pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat dimaksudkan dalam rangka menuju orientasi pemberdayaan (individu, kelompok, dan organisasi). Topik kajian dalam buku ini membahas, antara lain: konsep dasar organisasi, kepribadian dan nilai dalam organisasi, dinamika kelompok, motivasi, kepemimpinan, komunikasi, pengambilan keputusan dalam organisasi, budaya organisasi, manajemen konflik, serta kekuasaan dan politik pemberdayaan dalam organisasi.

Book Chapter Abdimas Jilid 2: Ekonomi dan Ilmu Administrasi

"This book addresses one of the most crucial questions in Southeast Asia: did the election in Indonesia in 2014 of a seemingly populist-oriented president alter the hegemony of the political and economic elites? Was it the end of the paradox that the basic social contradictions in the country's substantial capitalist development were not reflected in organized politics by any independent representation of subordinated groups, in spite of democratization? Beyond simplified frameworks, grounded scholars have now come together to discuss whether and how a new Indonesian politics has evolved in a number of crucial fields. Their critical insights are a valuable contribution to the study of this question." — Professor Olle Törnquist, Department of Political Science, University of Oslo "A most valuable book for understanding the underpinnings of Indonesian politics in 2019 and beyond. A great range of themes are included: political parties, ideologies, political Islam, leadership legitimacy, the political middle

class, the politics of centre–local relations, corruption, limited foreign policy reform, Papua, and youth activism. The book has eleven chapters, mostly by Indonesia-based analysts, plus a couple of wise old hands. Max Lane's overview chapter is excellent." — Professor David Reeve, School of Humanities and Languages, University of New South Wales

Dalam Undang Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, ASN mempunyai salah satu fungsi sebagai pelayan publik. Pelayanan oleh ASN kepada masyarakat merupakan unsur yang penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah, sehingga sering dijadikan indikator keberhasilan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tugas pelayanan yang diberikan seorang ASN sangatlah menentukan tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani sekaligus menentukan tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, ASN dituntut bekerja secara optimal untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, sehingga kebutuhan pelayanan terpenuhi dan masyarakat menjadi puas. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut yakni dengan membangun pribadi prima dalam pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas sangat diharapkan oleh masyarakat, tetapi memang tidak mudah mewujudkannya. Banyak faktor yang mempengaruhi berkualitas tidaknya pelayanan publik, salah satu diantaranya yaitu faktor kepribadian aparat (petugas). Kepribadian aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani dan sebaliknya cenderung menunjukkan perilaku ingin dilayani, menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pelayanan publik. Dulu pandangan masyarakat terhadap Pegawai ASN di DKI Jakarta, kecenderungan negatif seperti malas, korup, kurang melayani, tidak produktif, dan lain sebagainya. Oleh karenanya kegiatan pelayanan publik, membutuhkan berbagai terobosan inovasi pelayanan, termasuk membangun kepribadian ASN petugas pelayanan, guna melakukan perubahan, sehingga terwujud pelayanan publik yang berkualitas.

On Sunday 26 December 2004, a tsunami of up to 30 metres high hit the northern tip of Sumatera in Indonesia, causing immediate destruction and the deaths of at least 130,000 in Indonesia alone. The scale of the devastation and ensuing human suffering prompted the biggest response endeavour to any natural disaster in history. *Post-Disaster Reconstruction* will be the first major book that analyses the different perspectives and experiences of the enormous post-tsunami reconstruction effort. It looks specifically at the reconstruction efforts in Aceh, one of the regions most heavily-hit by the tsunami and a province that has until recently suffered nearly three decades of armed conflict. Positioning the reconstruction efforts within Aceh's multi-layered historical, cultural, socio-political and religious contexts, the authors explore diverse experiences and assessments of the reconstruction. It considers the importance of the political and religious settings of the reconstruction, the roles of communities and local non-government organisations and the challenges faced by Indonesian and international agencies. From the in-depth examination of this important case

study of disaster reconstruction - significant not only because of the huge scale of the natural disaster and response but also the post-conflict issues - the editors draw together the lessons learned for the future of Aceh and make general recommendations for post-disaster and post-conflict reconstruction-making.

Buku Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan untuk Kesehatan Masyarakat ini disusun untuk keperluan Mahasiswa atau siapapun yang ingin belajar mengenai pengetahuan dasar keilmuan administrasi dan kebijakan kesehatan. Oleh karena untuk menjadi seorang ahli pada bidang Kesehatan Masyarakat yang berwawasan luas dan handal, maka memperbanyak membaca buku adalah salah satu upaya yang mesti dilakukan. Dengan merujuk pada buku ini dapat menjadi sebuah pengalaman baru terkait pemahaman Ilmu Kesehatan Masyarakat terutama paham lebih luas mengenai administrasi dan kebijakan kesehatan. Buku ini disajikan dengan materi yang menarik dan olah bahasa yang mudah dipahami pembaca. Sehingga tidak diragukan lagi, apabila akan dijadikan sebagai salah satu buku terbaik untuk dimiliki. Khususnya bagi mereka yang sangat menyukai topik administrasi dan kebijakan kesehatan.

Ketertarikan penulis untuk menulis buku dengan judul Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik – Edisi Revisi ini berawal dari ranah administrasi publik sangat luas, kompleks, dan dinamis telah menimbulkan kesulitan amat besar untuk membangun teori tunggal sebagai satu-satunya teori yang mampu memberikan deskripsi dan eksplanasi yang komprehensif dan akurat terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Kondisi ini akhirnya mendorong berkembangnya aneka ragam metodologi (pendekatan) dalam administrasi publik. setiap pendekatan dan teori, pada dasarnya merupakan hasil derivasi dari meta-teori yang melandasinya. Teori baru timbul sebagai hasil derivasi dari landasan meta-teori yang berbeda dengan teori lama sehingga perubahan dari teori satu ke teori berikutnya, seperti ditegaskan Thomas Khun, tidak sekedar bersifat revolusioner kumulatif tetapi justru lebih bersifat revolusioner paradigmatic.

Environmental Governance merupakan suatu interaksi multi-level antara lokal, nasional, bahkan global yang dilakukan dalam ranah kebijakan terkait lingkungan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Semakin meningkatnya frekuensi kasus, termasuk pembalakan liar, polusi kabut asap, dan masalah lingkungan lainnya, telah memberikan kontribusi bagi munculnya ide-konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali bukan hanya akan mengakibatkan kelangkaan sumber daya, namun juga dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. Tentu saja degradasi lingkungan yang terjadi sungguh berbahaya bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan ekosistem. Untuk itu, diperlukan kebijakan-regulasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat preventif untuk mengeliminasi (dampak) degradasi hingga destruksi lingkungan. Buku ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yang terdiri atas 8 (delapan) bab. Bagian I: Pengantar, Bagian II: Environmental Governance di Indonesia, dan Bagian III: Isu-isu terkait Environmental Governance.

This book contains the proceedings of the The International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (ICLSSEE 2021). Where held on 6 Maret 2021 in Salatiga, Central Java. This conference was held in collaboration Nusantara Training

and Research (NTR) with Borobudur University Jakarta and the Research and Development Agency of the Ministry of Home Affairs. The papers from these conferences collected in a proceedings book entitled: Proceedings of The International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (ICLSSEE 2021). The presentation of such conference covering multi disciplines will contribute a lot of inspiring inputs and new knowledge on current trending about: Law, Social Science, Economics, and Education. Thus, this will contribute to the next young generation researches to produce innovative research findings. Hopefully that the scientific attitude and skills through research will promote the development of knowledge generated through research from various scholars in various regions Finally, we would like to express greatest thankful to all colleagues in the steering committee for cooperation in administering and arranging the conference. Hopefully these seminar and conference will be continued in the coming years with many more insight articles from inspiring research. We would also like to thank the invited speakers for their invaluable contribution and for sharing their vision in their talks. We hope to meet you again for the next conference of ICLSSEE.

Hukum administrasi negara telah berkembang sejalan dengan gerak pemerintah mulai menata masyarakat. Dalam kaitan itu pemerintah menggunakan sarana hukum sebagai instrumen pengaturan. Sebagai perwujudannya, pemerintah mengeluarkan / melaksanakan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan keputusan-keputusan yang mengandung suatu larangan maupun berupa kebolehan (izin). Oleh karna itu, sejak awal, bahkan, sejak dahulu kala pemerintah telah terlibat atau telah menggunakan sarana hukum dalam penataan dan pengelolaan masyarakat. Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat menyebabkan pula berkembangnya tugas-tugas pemerintahan yang dapat di lihat pada berbagai bidang urusan pemerintahan telah terjadi penumpukan aturan-aturan dan keputusan-keputusan pemerintah yang saling melengkapi, bahkan dapat pula bersifat mengubah karna terjadinya perubahan situasi dan kondisi dalam masyarakat.

As an annual event, 2nd International Conference of Science Education in Industrial Revolution 4.0 (ICONSEIR) 2019 continued the agenda to bring together researcher, academics, experts and professionals in examining selected theme by applying multidisciplinary approaches. In 2019, this event will be hed in 17 December at La Polonia Hotel and Convention. The conference from any kind of stakeholders related with Education, Information Technology, Engineering and Mathematics. Each contributed paper was refereed before being accepted for publication. The double-blind peer reviewed was used in the paper selection.

[Copyright: 05feacb422a99062809266849f5fcb9b](https://doi.org/10.24127/aj.v1i1.12345)